

ABSTRAK

Penelitian ini membahas Implementasi kebijakan Pemerintah Kota Lhokseumawe dalam penanganan pengemis anak di Kota Lhokseumawe. Pemerintah Kota melalui Dinas Sosial Kota Lhokseumawe telah menerapkan kebijakan untuk penanganan pengemis anak yang berkeliaran di Kota Lhokseumawe melalui razia penertiban terhadap pengemis anak, pendataan terhadap pengemis anak, dan himbauan kepada para masyarakat agar tidak memberikan sumbangan kepada para pengemis anak di lampu merah. Namun hingga saat ini jumlah pengemis anak yang berkeliaran di Kota Lhokseumawe tetap terus ada. Berdasarkan permasalahan di atas penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan Dinas Sosial dalam penanganan pengemis anak di Kota Lhokseumawe dan apa yang mendorong implementasi kebijakan penanganan pengemis anak di Kota Lhokseumawe belum efektif. Perspektif teoritik yang digunakan dalam studi ini adalah implementasi kebijakan menurut Edward III melalui 4 variabel yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas Sosial dalam melakukan implementasi kebijakan penanganan pengemis anak di Kota Lhokseumawe dilakukan dengan menjalin kerjasama dengan instansi Satpol pp saat melakukan penertiban terhadap pengemis anak, Dinas Sosial juga telah berkomitmen dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan SOP yang dimiliki namun penerapan kebijakan belum efektif karena tidak tersedia anggaran dan fasilitas khusus untuk penanganan pengemis anak, rendahnya kesadaran diri dalam pengemis anak dan kurangnya partisipasi masyarakat sehingga penerapan kebijakan menjadi terhambat dan tidak berjalan dengan baik sehingga mengakibatkan pengemis anak masih tetap ada di Kota Lhokseumawe.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Penanganan, Pengemis Anak.

ABSTRACT

This research discusses the implementation of Lhokseumawe City Government policies in handling child beggars in Lhokseumawe City. The City Government through the Lhokseumawe City Social Service has implemented a policy to handle child beggars roaming around Lhokseumawe City through controlling raids on child beggars, collecting data on child beggars, and appealing to the public not to make donations to child beggars at red lights. However, until now the number of child beggars roaming around Lhokseumawe City continues to exist. Based on the problems above, this research aims to find out how the Social Service policy is implemented in handling child beggars in Lhokseumawe City and what drives the implementation of policies for handling child beggars in Lhokseumawe City that have not been effective. The theoretical perspective used in this study is policy implementation according to Edward III through 4 variables, namely communication, resources, disposition and bureaucratic structure. The method used in this research is descriptive qualitative with data collection techniques through observation, interviews and documentation. The results of this research show that the Social Service in implementing the policy for handling child beggars in Lhokseumawe City is carried out by collaborating with the Satpol PP agency when controlling child beggars, the Social Service has also been committed to carrying out its duties in accordance with the SOP it has but the implementation of the policy has not been effective because there is no budget and special facilities available for handling child beggars, low self-awareness of child beggars and lack of community participation so that policy implementation is hampered and does not work well, resulting in child beggars still existing in Lhokseumawe City.

Keywords : *Policy Implementation, Handling, Child Beggars.*